



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Selasa**      Tanggal : **23**      Bulan : **JUNI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA :</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman :** 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



Walikota Mangara Pardede saat melihat proses pencetakan e-KTP di PTSP kantor Walikota Jakarta Pusat.

## E-KTP Bisa Dicitak di Kantor Walikota

**GAMBIR (Pos Kota)** - Selain di Kelurahan Bungeo, Senen, percepatan pencetakan e-KTP atau KTP elektronik kini juga bisa dilakukan warga di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kantor Walikota Jakarta Pusat, Senen (22/6).

"Dengan dapat dilaksanakannya pencetakan e-KTP di PTSP ini, tentunya akan memudahkan warga yang sudah merekam data," terang Walikota Mangara Pardede, usai meresmikan pelayanan e-KTP di ruang

PTSP kantor Walikota Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, penyediaan pencetakan e-KTP oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat tersebut juga sebagai bentuk peningkatan kualitas kerja dalam pelayanan publik dengan cepat. "Bagi warga yang sudah rekam e-KTP tapi belum cetak, dapat dilakukan di sini," paparnya.

Sementara itu, Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, Wazisih men-

gatakan, untuk pencetakan e-KTP di wilayah Jakarta Pusat, baru bisa dilakukan di kantor Kelurahan Bungeo, dan di PTSP kantor Walikota Jakarta Pusat.

"Minimnya penyediaan pencetakan e-KTP ini, karena memang masih terbatasnya perangkat yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri sendiri," ucapnya seraya menjelaskan, hingga Juni 2015, Sudin Dukcapil Jakarta Pusat telah mencetak 14.604 e-KTP. (demy/st)



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Selasa** Tanggal : **23** Bulan : JUNI Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. <b>Sentana</b>	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

## DUA TAHUN JELANG PILKADA DKI

### Jakarta Pusat Buka Layanan E-KTP di PTSP



**Jakarta SENTANA**  
**MEMPERCEPAT**  
Pelayanan KTP Elektronik (E-KTP) serta demi memudahkannya proses pendaftaran KTP, Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, menyediakan pelayanan pencetakan KTP elektronik di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Program pemerintah DKI Jakarta, yang telah berkomitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, gratis harus dilaksanakan ditingkat kota," kata Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede saat meresmikan pelayanan KTP Elektronik di kantor PTSP, Jakarta Pusat (22/6).

Menurut Mangara, bagi warga yang telah mere-

kam E-KTP tetapi belum dicetak dan tidak sempat datang ke kelurahan, sekarang bisa dicetak di Kantor Walikota Jakarta Pusat yaitu di loket pelayanan PTSP.

"Sekarang warga Jakarta Pusat bisa mencetak KTP elektronik selain di Kelurahan juga bisa dilakukan di Sudin Dukcapil serta di PTSP ini. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sekaligus untuk memantapkan data menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak)," kata Mangara.

Sementara itu, dalam acara yang sama, Kepala Suku Dinas (Kasadin) Dukcapil Jakarta Pusat Warisih, perangkat KTP Elektronik yang disediakan Kementerian Dalam

Negeri masih terbatas ada dua perangkat, "Sehingga Sudin Dukcapil menambah perangkat jadi enam perangkat KTP Elektronik," jelasnya.

Menurut Warisih, hasil KTP di Jakarta Pusat sebanyak 702.543 jiwa per bulan Desember 2014. Sesuai data dari Kementerian Dalam Negeri, warga Jakarta Pusat yang sudah merekam namun belum jadi sebanyak 47 ribuan orang. "Dan hingga pertengahan bulan Juni 2015 Sudin Dukcapil sudah mencetak sebanyak 14.605 keping," katanya.

Sehubungan dengan data warga calon pemilu di Jakarta Pusat, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, sekarang ini tengah membenahi data-data calon pemilih di wilayah DKI Jakarta. "KPUD sedang membenahi data data calon pemilih di Jakarta menjelang perubahan undang undang Pemilukada serentak. Walau Pemilukada masih dua tahun lagi namun mulai sekarang data calon pemilu harus diperbaiki," kata salah seorang bagian Pemutakhiran Data KPUD DKI, Sidik, kepada SENTANA.

■ITS



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : Selasa      Tanggal : 23      Bulan : JUNI      Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

PELAYANAN MASYARAKAT

## Dukcapil Jakpus Sediakan Pencetak E-KTP

JAKARTA (Suara Karya): Guna memudahkan warga yang sudah merekam E-KTP, kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Pusat, menyediakan pelayanan pencetakan KTP elektronik di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat ingin terus meningkatkan kualitas kinerjanya dengan melakukan pelayanan publik dengan cepat, murah bahkan gratis, termasuk dalam mengurus KTP Elektronik.

Hal itu dikatakan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Parade saat meresmikan pelayanan KTP Elektronik pada loket PTSP Kantor Wali Kota, Serus (17/6). Pelayanan ini menjadi ludo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-458 Kota Jakarta.

Mangara mengharapkan, bagi warga yang telah melakukan perekam E-KTP,

tetapi belum dicetak dan tidak sempat datang kekelurahan, sekarang bisa dicetak di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat yaitu di PTSP. "Warga yang belum cetak dan kebetulan ada di Walikota silakan Cetak disini," ucapnya.

Dikatakan, saat ini warga Jakarta Pusat bisa mencetak KTP elektronik selain di Kelurahan Bungur juga dapat dilakukan di Sudin Dukcapil dan di PTSP. "Peresmian PTSP ini dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat," ujar Mangara.

Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Pusat, Hj Wariyah mengatakan perangkat KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri masih terbatas. Di wilayah Jakarta Pusat perangkat KTP elektronik di Sudin Dukcapil ada empat set, di Kelurahan Bungur satu set dan di PTSP satu set jadi semuanya ada enam perangkat KTP Elektronik. **(yon)**



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : Selasa      Tanggal : 23      Bulan : JUNI      Tahun : 2015

<b>MEDIA :</b>	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
<b>Halaman :</b>	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			<b>Kolom :</b> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Kantor PTSP Jakarta Pusat Siap Cetak e-KTP

### Tanah Abang, Warta Kota

Suhanda (58) dari Jemberlah (50) seminggu saja menerima kartu tanda penduduk (KTP) elektronik setelah keduanya melakukan rekam data di Kantor Pelayanan Terpadu Sains Fintu (PTSP) Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Baik Suhanda maupun Jemilah mengaku, sebelum rekam data, keduanya diranca menyebarkan KTP reguler yang selama ini dibawa. "Cuma masalah waktu saja. Saya belum sempat mengganti KTP lama saya jadi KTP Elektronik. Tapi, sekarang saya sudah punya e-KTP," ujar Suhanda senang.

Hal serupa juga diungkap Jemilah. Perempuan warga Petjo Selatan, Gombir, Jakarta Pusat, itu mengaku sudah lama ingin mengganti

miliknya. "Tapi, saya belum sempat ke Kantor Suku Dinas Kependudukan. Nah, pas ada peresmian mesin cetak, ini saya manfaatkan buat bikin e-KTP," ujar Jemilah, Senin (22/6).

Sementara, Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede, yang meresmikan layanan pencetakan KTP Elektronik di Kantor PTSP Jakarta Pusat, mengungkapkan, dengan ketersediaan alat cetak e-KTP di Kantor PTSP Jakarta Pusat, masyarakat bisa menghemat waktu.

"Jadi, tidak harus ke kantor kelurahan lagi. Jika ada kesempatan, akan mengganti KTP reguler menjadi e-KTP," ungkap Mangara. Jadi, lanjut Mangara, warga yang sudah melakukan rekam data, bisa mencetak e-KTP di Kantor PTSP atau di Kantor



**Mangara Pardede**

### Kelurahan Dagar.

#### Verifikasi

Sementara, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, Warisih, menambahkan, sebelum pencetakan e-KTP, para wajib-KTP diminta menyerahkan KTP reguler dan mengambil nomor antrian.

Seperti proses perekaman data, petugas akan memeco-

### E-KTP di Jakarta Pusat

- Total Wajib KTP ada sebanyak 792.543 jiwa
- Wajib KTP yang sudah rekam ada sebanyak 47.000 jiwa
- E-KTP yang telah tercetak ada sebanyak 14.605 keping

kin atau memverifikasi data wajib-KTP yang sebelumnya sudah terekam dalam server e-KTP. "Jika seluruh data tidak ada perubahan dan sesuai, maka ke tahap validasi hingga pencetakan e-KTP," ungkap Warisih.

Lewat pencetakan e-KTP di Kantor PTSP ini, lanjut Warisih, warga Jakarta Pusat yang telah wajib-KTP dapat dengan mudah melakukan pencetakan Kantor PTSP Jakarta Pusat. (dwi)



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **SELASA**

Tanggal : **23**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

### PTSP Jakarta Pusat Bisa Cetak KTP Elektronik

Mulai pekan ini, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Pusat menyediakan pelayanan cetak KTP elektronik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Pusat yang terletak di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dalam keterangan pers, kemarin, mengatakan, pelayanan itu bertujuan memungkinkan masyarakat mengurus KTP elektronik secara cepat, mudah, dan gratis. Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Pusat Warsidi mengatakan, perangkat administrasi KTP elektronik dari Kementerian Dalam Negeri masih terbatas. Di wilayah Jakarta Pusat, baru tersedia empat set di Sudin Dukcapil, satu set di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, dan satu set di PTSP. Adapun jumlah warga Jakarta Pusat yang wajib memiliki KTP adalah 702.543 jiwa per Desember 2014. Data dari Kementerian Dalam Negeri, warga Jakarta Pusat yang sudah merekam data untuk KTP elektronik, tetapi belum mencetak KTP elektronik sekitar 47.000. Hingga pertengahan Juni 2015, Sudin Dukcapil sudah mencetak 14.602 KTP elektronik (AKR).



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : SENIN

Tanggal : 22

Bulan : JUNI

Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	7. Lampu Hijau	13. Republika	19. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	8. Media Indonesia	14. Suara Karya	20. Reaksi Nasional
	3. Kompas	9. NonStop	15. Serbita	21. Balak Pos
	4. Koran Sindo	10. Pos Kalz News .com	16. Suara Pembaruan	22. Berita Jakarta.com
	5. Koran Tempo	11. Pelita	17. Sinar Harapan	
	8. Koran Jakarta	12. Rakyat Merdeka	18. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Kolom: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Warga Bisa Cetak E-KTP di PTSP

reporter: Rudi Hermawan | editor: Infyanti Maslisa | Senin, 22 Juni 2015 17:01 WIB | dibaca 419 kali



(Foto: Rudi Hermawan / Beritajakarta.com)

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede meresmikan pencampatan perangkat pencetakan KTP elektronik (e-KTP) di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jl Tanah Abang 1, Gambir, Senin (22/6).

"Jadi masyarakat, khususnya di Jakarta Pusat yang sudah merekam di kelurahan bisa langsung cetak KTP elektronik di sini dan di Kelurahan Bungur."

"Jadi masyarakat, khususnya di Jakarta Pusat yang sudah merekam di kelurahan bisa langsung cetak KTP elektronik di sini dan di Kelurahan Bungur," ujar Mangara, Senin (22/6).

Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, Warisih menuturkan, saat ini perangkat pencetakan e-KTP di Jakarta Pusat ada lima set yakni empat di Sudin Dukcapil dan satu di Kelurahan Bungur. Untuk pencetakan hanya bisa dilakukan di Kelurahan Bungur dan PTSP Kantor Walikota Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, warga bisa mencetak KTP elektronik di PTSP Kantor Walikota Jakarta Pusat dengan catatan warga datang langsung ke lokasi layanan dengan membawa KTP lama, tidak ada perubahan data, tidak ganda atau tidak terdaftar di wilayah lain serta tidak ada perubahan alamat.

"Kalau tidak ada perubahan biodata bisa langsung di cetak di sini (PTSP Kantor Walikota Jakarta Pusat) dan Kelurahan Bungur. Tapi kalau ada perubahan data harus melalui PTSP di kecamatan atau kelurahan," tuturnya.

Dikatakan Warisih, tercatat wajib KTP di Jakarta Pusat sebanyak 792.543 jiwa per Desember 2014. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yang sudah merekam sebanyak 47.000, sementara yang telah di cetak sebanyak 14.605 hingga pertengahan Juni 2015.

"Diharapkan warga yang belum melakukan perekaman agar segera melakukan perekaman di kelurahan masing-masing, sebab sebentar lagi akan dilakukan pilkada serentak," tandasnya.



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Selasa**      Tanggal : **23**      Bulan : **JUNI**      Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

**Beri Bantuan Kepada Masjid dan Anak Yatim**

## Walikota: Bulan Ramadhan, Hentikan Tawuran Antar Warga



Mangara saat beri bantuan anak yatim.

**NONSTOP BANTUAN-** Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengimbau jajaran RT, RW, tokoh masyarakat, dan ulama supaya dapat mengawasi warga langkretongnya masing-masing. Orang nomor satu di Jakarta Pusat itu berharap, di bulan Ramadhan lebih banyak beribadah, dan meningkatkan amal dan kebajikan. Dia mengimbau, agar para anak muda tidak banyak nongkrong di jalan sambil memajang petasan sehingga menimbulkan tawuran antar warga.

"Kita berharap Ramadhan ini tidak didominasi langkretangan jahil, hingga memicu tawuran antar warga. Kita berharap Ramadhan berjalan dengan kondusif, karena itu perisai serta RT, RW, tokoh masyarakat, dan ulama diperlukan disini," terang Mangara, kemarin.

Disamping itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memberikan bantuan kepada Masjid Al-Hidayah RW 05, Harapan Mulya,

Kemayoran, dan Masjid Al-Huda Rw. 003, Kel. Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih masing-masing sebesar Rp 7,5 juta dan Rp. 5 juta. "Daripada nongkrong di pinggir jalan, lebih baik di bulan yang penuh rahmat dan berkah ini diisi dengan kegiatan positif seperti meningkatkan sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah lainnya, tadarrus Al-quran serta mengikuti pesantren kitab," kata Mangara.

Lebih lanjut dia mengimbau warga Jakarta Pusat, di bulan yang penuh rahmat dan berkah ini, supaya memperbanyak amal ibadah serta berlomba menugu kebajikan. "Serta meningkatkan silaturahmi antar warga, sebab dengan silaturahmi dapat mengoreksi tawuran," ujar Mangara.

Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, bersama dengan jajarannya juga memberikan bantuan kepada anak Yatim berupa uang, dan janda berupa sembako (RAM)



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : Selasa Tanggal : 23 Bulan : JUNI Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Wali Kota Jakarta Pusat Santuni Masjid dan Anak Yatim

Jakarta, Pelita

Wali Kota Jakarta Pusat Meng-

garn Pardede memberikan santu-

an ke Masjid Jama' Al-Hidayah, Mas-

jid Al-Hidayah, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih.

Selain itu, secara simbolis, Meng-

garn juga memberikan santunan

anak yatim berupa uang dan se-

jumlah sembako.

"Kita hamparkan pada RT/RW,

teknis masyarakat, supaya dapat

mengawal warga lingkungannya

masuk-masing. Khusus di bulan

Ramadan kerap kali anak yatim

banyak yang mengemong di jalan

sambil memancing perasan sebaga-

ya memanfaatkan tawaran anak

warga," ujarnya. Senin (22/6).

Ramadan, kata Mangara, lebih

baik diisi dengan berbagai ke-

giatan yang positif. "Kita juga

mengimbau kepada warga supaya

memperbanyak amal ibadah

serta berlonka menajui kebaikan

serta meningkatkan solidaritas

antar warga, sebab dengan solidar-

itas dapat meningkatkan keharu-

han," jelasnya. (Har/asa)



**SANTUNI MASJID** — Wali Kota Jakarta Pusat Mengarn Pardede memberikan santunan ke Masjid Jama' Al-Huda, Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih. Selain itu, secara simbolis.





**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : Selasa      Tanggal : 23      Bulan : JUNI      Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. <b>Warta Kota</b>	

Halaman : 1, 3, 5, **7**, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## Amuk "PKL" Silang Monas

Sudah berulang kali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Abah) berbicara keras tentang pedagang kaki lima (PKL) di Taman Silang Monas. "Saya ingin pasang tiduran buat sempit air tomboran Oot PKL," kata Abah. Pernyataan itu sebagai tanggapan keras atas ulah brutal para PKL yang menyergap personel Satpol PP yang berstatus di pintu timur, serta melakukan pengrusakan di kawasan Suliner Lenggang Jakarta yang berada di lapangan IRTI Monas.

Ulah amuk PKL itu terjadi pada Sabtu (20/6) sekitar pukul 19.00. Saat itu, petugas Satpol PP sedang membuka pasar di kawasan pintu timur Monas. Tanpa diduga ada ratusan orang datang ke pintu itu. Sebagian bermodalkan senjata tajam dan lakuk kayu. Serangan itu membuat petugas Satpol PP kees-kees. Serangan itu merusak pula uzeka kelengkapan di Lenggang Jakarta. Meja dan kursi makan mereka jungkir-balikkan, etalase kaca stan makanan mereka hancur, juga televisi LCD. Para pengunjung arena kultur itu panik lari ketakutan.

"Ada enam kendaraan seperti motor operasional petugas di lapangan rusak," kata Sugianto, Kepala Seksi Operasional Satpol PP DKI Jakarta, menceritakan kejadian tersebut (Warta Kota, Senin, 22 Juni 2015 hal 3).

Bisa jadi amuk itu muncul setelah Pemda DKI melakukan penataan PKL dengan memberi ruang berjualan hanya di area Lenggang Jakarta, tanpa membolehkan berjualan di area lain. Penataan di area Lenggang Jakarta itu pun dilakukan setelah Pemda gagal melakukan penataan secara persuasif PKL yang merubuhkan lapak di seribu-ribu tempat di Monas, yang menyebabkan kawasan itu menjadi kumuh dan semrawut.

Pada awalnya, PKL boleh berjualan di Monas atas prakarsa Jokowi-Abah, saat mereka memimpin Jakarta dua tahun lalu. Niat mereka baik, memberi peluang usaha kepada PKL di kawasan tersebut, setelah selama dua gubernur sebelumnya Monas dijadikan daerah steril dengan diberi pagar keliling, dengan penjagaan ketat.

Namun, peluang yang dibuka Jokowi-Abah kepada PKL justru dimanfaatkan oleh para "preman" berorganisasi untuk mengkapling area Monas. Mereka "menjual" kapling itu kepada PKL. Akibatnya, ribuan PKL membuka bisnis di Monas, sehingga tak terkendali. Ketika Pemda mencoba untuk menata, nganukliah orang-orang yang merasa rezekinya diputus. Padahal mereka mendapat rezeki dengan cara melanggar aturan, atau memanfaatkan pihak yang lemah. Model mengrusak rezeki macam ini banyak terjadi di Jakarta, tak hanya di Monas. (\*\*)



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **SELASA**

Tanggal : **23**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **31**

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Pedagang Kaki Lima Membeludak

Memasuki Bulan Puasa Atau Menjelang Lebaran, pedagang kaki lima membeludak di Pasar Baru Metro Atom, Jakarta Pusat. Pasar tradisional yang baru selesai direvitalisasi itu berubah drastis menjadi semrawut, jorok, dan rawan kejahatan akibat membeludaknya pedagang atau selain *mainstay* area pasar tradisional yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar Jaya tersebut.

Ratusan pedagang binaan Area PD Pasar Jaya Pasar Baru Metro Atom diketahui merupakan perpanjangan tangan atau usaha para pedagang dengan modal kuat. Sebab, para pedagang tersebut ditempatkan di lapak-lapak dengan ukuran dan harga bervariasi, yakni Rp 5-35 juta per lapak.

Lapak-lapak tersebut berada di halaman pasar, ruang terbuka hijau, atau ruang terbuka hijau dan selasar yang merupakan sarana/prasarana umum. Dengan kondisi tersebut, area PD Pasar Baru Metro Atom tak lagi terasa aman dan nyaman saat ini.

Sejumlah pedagang ekonomi lemah pemilik kios-kios di area PD Pasar Jaya Pasar Baru Metro Atom mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima karena mendadak berkembang bagaikan jamur di musim hujan. Keberadaan pedagang kaki lima, yang merupakan perpanjangan tangan para pedagang yang kuat modal, otomatis merontokkan omzet penjualan para pedagang ekonomi lemah.

PD Pasar Jaya dituding tak lagi membina para pedagang ekonomi lemah di 153 pasar tradisional di lima wilayah hukum DKI Jakarta, melainkan berkesin berupaya membinasakan para pedagang ekonomi lemah dengan memanipulasi pedagang-pedagang kuat menjadi pedagang kaki lima.

Suryadi  
Jakarta



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Selasa**      Tanggal : **25**      Bulan : **JUNI**      Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## PKL Membeludak di Pasar Baru

**P**ASAR Baru Metro Atom, Jakarta Pusat, baru selesai direvitalisasi. Namun, sangat disayangkan, kondisi pasar berubah drastis jadi semrawut, jorok, dan rawan kejahatan akibat membeludaknya pedagang kaki lima (PKL) atas izin Manajer Area Pasar Tradisional Pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Ratusan PKL binaan Area PD Pasar Jaya Pasar Baru Metro Atom diketahui merupakan perpanjangan tangan atau usaha para pedagang kuat. Mereka diatur dan ditempatkan untuk berusaha di lapak-lapak dengan ukuran dan harga bervariasi, yakni Rp5 juta-Rp35 juta/lapak.

Lapak-lapak tersebut berada di halaman pasar, ruang terbuka hijau, atau ruang terbuka hijau dan selasar yang merupakan sarana/prasarana umum. Area PD Pasar Baru Metro Atom berubah drastis dan tak lagi tercipta rasa aman/nyaman.

Sejumlah pedagang ekonomi lemah yang berusaha di kios-kios Area PD Pasar Jaya Pasar Baru Metro Atom mengeluhkan keberadaan PKL karena mendadak berkembang bagaikan

jamur di musim hujan. Dampak keberadaan PKL perpanjangan tangan pedagang-pedagang kuat itu otomatis merontokkan omzet penjualan para pedagang ekonomi lemah.

PD Pasar Jaya dituding tak lagi membina para pedagang ekonomi lemah yang berusaha di 153 pasar tradisional di wilayah hukum DKI Jakarta, tetapi membinasakan para pedagang ekonomi lemah dengan memanipulasi pedagang-pedagang kuat menjadi PKL. Seperti halnya pejabat di Pasar Baru Metro Atom yang mendapat tuduhan meraup uang banyak untuk kepentingan pribadi. Kasus yang dianggap manipulatif tersebut dilakukan secara terstruktur, terencana, dan masif.

Diharapkan kepada penegak hukum agar menaruh perhatian serius terhadap masalah seperti itu di semua area pasar tradisional. Apalagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sudah berkali-kali membeberkan kasus manipulasi PKL. Semoga keluhan ini mendapatkan perhatian serius.

**Suryadi**  
 Jakarta



Hari : **SELASA**      Tanggal : **23**      Bulan : **JUNI**      Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

**PENERTIBAN PKL**

## Gubernur Ancam Bertindak Keras

JAKARTA, KOMPAS – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjaja Purnama mengancam akan bertindak keras kepada para pedagang kecil liar yang tetap berjualan di kawasan wisata Monas di luar lokasi resmi di Lenggong Jakarta. Dia juga mempersilakan para pedagang di dalam Lenggong Jakarta yang tak mau dilatahkan keluar dari semua kafe dan warung itu.

Istilah tersebut diungkapkan Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin (22/6), terkait tindak lanjut terhadap kasus pemukiman di Lenggong Jakarta, Sabtu malam lalu.

Gubernur mengatakan, sudah mendapatkan informasi dari Pelti Metro Jaya bahwa polisi sudah tahu siapa orang yang melakukan pemukiman di Lenggong Jakarta.

"Kapolda yang lama ini, kan, topi Teoria saja ditangkap, apalagi yang jalan-jalan seperti ini. Beliau sudah bilang ke saya, sudah tahu siapa saja yang 'main'. Otaknya siapa saja, sudah diketahui," katanya.

Basuki menyiratkan ada sebagian PKL yang sudah dilatahkan di Lenggong Jakarta bermula di dua kaki. Artinya, ada PKL yang tetap memiliki lapak di luar Lenggong Jakarta. Dia pun mempersilakan PKL yang seperti itu untuk keluar dari kompleks resmi tersebut.

"Silakan jualan di tempat lain, jualan di Monas. Kalau kalian (PKL) sudah kerja, saya juga sudah kerja. Sudah makan (sue) pemukiman Lenggong Jakarta) itu mereka mencanangkan dengan baik. Saya sudah minta agar Satpol PP dipersenjatai alat kerja listrik. Kalau kalian (PKL) amek-bete, saya sudah terbeli pistol peluru karet. Kalau mereka sudah bawa pistol, saya pakai gas air mata. Tidak bisa serdadu begitu," kata Basuki.

Pemukiman Lenggong Jakarta oleh sekelompok orang itu dianggap beresik ketidaksihutan akses legal PKL di luar Lenggong Jakarta untuk berjualan di kawasan wisata Monas.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Joko Kusdiyono, Senin, mengatakan, selaras Lenggong Jakarta dijaga lebih ketat oleh aparat komersial, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Para pedagang juga sudah berhitung seperti biasa. "Sejumlah fasilitas yang rusak, seperti mesin cuci dan beberapa peralatan, sudah mulai diperbaiki," katanya.

Sebagaiantisipasi agar tak terjadi perselisihan lagi, Joko mengatakan, pengelola harus lebih tegas dalam mengurus kawasan Monas, terutama Lenggong Jakarta. Dia pedagang dari luar area sekitar tak boleh masuk Monas, dalam itu harus diterapkan dengan tegas.

### Bertahan

Namun, berdasarkan pantauan Kompas, kemarin, para PKL masih bertahan berjualan di kawasan Monas. Di area parkir di TI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, belasan PKL menggelar lapak dagangan. Bahkan, ada pedagang yang menggunakan mobil pribadi untuk berjualan juga.

Salah satu pedagang berjualan A (60) mengaku tetap berjualan karena itu satu-satunya mata pencaharian untuk menghidupi istri dan anaknya. "Istri dan anak saya ada di kampung. Saya harus ngirit uang untuk makan keluarga dan bayar biaya sekolah anak-anak. Walaupun sering kejar-kejaran sama petugas, saya cuma bisa bilang diri saya," ujar pedagang berbagai jenis condera mata asal Bogor, Jawa Barat, itu.



**Dua tahun lalu, hanya ada 800 pedagang, sekarang ada sekitar 1.300 pedagang. Yang resmi hanya sekitar 300, sedangkan sisanya PKL liar.**

Yuli Purnamasari

Ameriplo, barang-barang yang ia jual ia dapat dari seorang pemusik yang mendapat tempat di Lenggong Jakarta. "Saya dan delapan teman yang ikut kontrol jualan begini semua. Kami ambil dari bus. Dia dapat tempat di dalam," ujarnya menyebut Lenggong Jakarta.

Ta sendiri ia sudah dapat tempat di Lenggong Jakarta karena tak bersedia sebagai PKL kawasan Dinas UMKM DKI Jakarta. Selain itu, ia tak sanggup membayar sewa lapak sebesar Rp 250.000 per bulan.

Ketua Satpol PP Jakarta Pusat Yuli Purnamasari memantapkan, persediaan PKL Monas menjadi hal pelek karena jumlah PKL terus meningkat meski sudah ditertibkan.

"Dua tahun lalu, hanya ada 800 pedagang, sekarang ada sekitar 1.300 pedagang. Yang resmi hanya sekitar 300, sedangkan sisanya PKL liar," ujar Yuli.

Menantar dia, PKL yang berdatangan ke kawasan Monas adalah PKL yang terlokasi gantung dari tempat lain. "Saya pernah lihat beberapa wajah pedagang dari kawasan Tanah Abang yang sudah digusur pindah berdagang ke Monas," katanya.

OSKA/TEO/INTIS/IANI



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : Selasa      Tanggal : 23      Bulan : JUNI      Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

#### JAKARTA PUSAT

## Tersangka Kasus PKL Anarkistis Bisa Bertambah

POLISI dari Polres Jakarta Pusat menetapkan satu orang sebagai tersangka yang terbukti menjadi provokator penyerangan terhadap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sarpol PP) dan perusakan sejumlah fasilitas umum serta kendaraan petugas, dalam kasus keributan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monumen Nasional (Monas) akhir pekan lalu.

Pelaku diketahui sebagai PKL yang berjualan di sekitar kawasan Monas.

"Kami akan terus mendalami motif penyerangannya," ujar Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hendro Pandowo, kemarin.

Ia menambahkan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. "Kami akan

memburu pelaku utamanya," tegas Hendro.

Hendro menjelaskan lebih lanjut, seluruh pelaku yang tersangkut peristiwa penyerangan dan perusakan terancam sanksi sesuai Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana Kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan kurungan penjara.

Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Monas Rini Hariyani menduga aksi anarkistis sejumlah PKL merupakan bentuk kekesalan akibat tidak dapat berjualan secara ilegal di dalam kawasan Monas.

"Kami inginnya si pelaku segera dihukum. Mudah-mudahan dari peristiwa ini para pedagang menjadi sadar dan tidak berbuat onar," pungkas Rini. (DA/J-4)





Hari : **SEKASA**

Tanggal : **23**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Penyerangan Monas Terindikasi Direncanakan

## Beberapa Waktu Lalu, Anggota Dewan Kunjungi PKL

**PENYERANGAN** oleh pedagang kaki lima (PKL) ke kawasan Lenggang Jakarta Monas, diduga ada yang mendalangi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menirigali penyerangan tersebut telah direncanakan sejak awal. Sebab tak mengira akan terjadi penyerangan.

Terlebih kejadian itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. "Waktu malam minggu itu mereka rencanakan dengan baik lah. Saya berfikir namanya bulan suci, puasa enggak mungkin orang bikin keruh. Tapi ternyata," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin (22/6).

Ahok mengatakan, dengan sistem transaksi non cash yang dibangun kios di Lenggang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Beberapa kios bahkan tidak ditempati oleh pedagang. Karena mereka berencana menjual lagi kios yang didapat.

"Mereka enggak mau dagang, mau aja jual. Sampai dengan e-money dia enggak

bisa jual, jadi banyak sekali dari rumah sampai laptop, dia baik-baikin kita, dia sabar dia nunggu sampai dapat terus dia jual. Kalau dia jual Rp 50 juta sampai Rp 100 juta kan lumayan. Tapi, ini enggak bisa" ujar Ahok.

Ia menegaskan, akan menindak jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat permasalahan itu. Bahkan jika ada aparatur yang juga terlibat telah difocustrokan juga untuk memberikan sanksi tegas. "Kalau ada oknum pegawai yang bermasalah kita pecat.

Termasuk Kapolda dan Panglima, kalau ada oknum terlibat itu akan mereka tindak," kata Ahok.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sebelum kejadian bertitik antara PKL dan Sespol PP, anggota DPRD DKI Jakarta Syarif bawahan ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun berkunjung ke Monas untuk bertemu pedagang.

Mereka mendengarkan keluhan pedagang, yang merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat Sespol PP.

Sementara itu, setelah penyerangan kawasan Lenggang Jakarta di Lapangan

Eks-IRTJ, Monas, Sabtu (20/6) lalu, sebagian pedagang terlihat belum berjualan kembali. Kerugian yang cukup besar tersebut didapati karena kerusakan sejumlah fasilitas berjualan yang terlihat cukup parah.

Pecahan kaca etalase tampak masih berceceran di lokasi. TV LCD yang terpasang juga sudah terlihat rusak berat, begitu pula dengan kantor pengelola dan kaca yang terpasang di kamar mandi umum.

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Sri Indriastuti mengakui, nilai kerusakan sejumlah fasilitas di kawasan Lenggang Jakarta mencapai Rp 100 juta.

"Setelah penyerangan, kami langsung lakukan pendataan aset yang dirusak, selanjutnya langsung kami laporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat agar ditindaklanjuti," tandas dia. (wok)



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : JUNI

Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

## Ratusan Pedagang Geruduk Kantor Walikota Jakpus



Pedagang Plaza Kenari demo di Kantor Walikota Jakpus.

**NONSTOP, GERUDUK-**Ratusan pedagang Plaza Kenari Mas geruduk Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (22/6). Para pedagang ini menuntut Wali Kota turunkan tangan menyelesaikan dualisme kepemimpinan di pasar tersebut.

Pantauan di lapangan para pedagang ini membawa berbagai spanduk meminta Wali Kota untuk ikut turan tangan mengambil alih serta menyelesaikan konflik yang ada di Plaza Kenari mas.

Arman (45), salah seorang pedagang di Plaza Kenari Mas mengatakan, ketidaknyamanan tersebut timbul karena adanya perselisihan antara kelompok pedagang. Akibatnya sesama pedagang saling curiga.

Arman juga menyayangkan adanya kelompok yang

memperkeruh suasana dengan terus membuat kekisruhan.

Arman berharap agar Wali Kota Jakarta Pusat bisa segera menindaklanjuti dan menyelesaikan kekisruhan yang terjadi di Plaza Kenari Mas.

"Jika tidak ada tanggapan dari Wali Kota kita akan datang lagi," tegasnya, Senin (22/6).

Sementara itu Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengaku sudah mengundang perwakilan developer, pemilik ruko dan pedagang. Minggu ini ketiga unsur tersebut akan dipanggil serentak untuk dilakukan mediasi.

"Bagaimana pun Plaza Kenari merupakan aset penting, untuk itu kita akan segera memediasi pihak-pihak yang berkepentingan," tandasnya. (RAM)





# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Selasa**      Tanggal : **23**      Bulan : **JUNI**      Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. <b>Lampu Hijau</b>	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2. **4** 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Minta Plaza Kenari Mas Jangan Diacak-acak Ratusan Pedagang Demo ke Walikota Jakpus

**Lampu Hijau, Jakarta Pusat** - Ratusan pedagang Plaza Kenari Mas, mendatangi balaman kantor Walikota Jakarta Pusat yang berada di Jalan Tanah Abang 1, No 1, Petoje Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/6) siang. Mereka meminta agar Walikota Jakarta Pusat untuk segera turun tangan dalam menyelesaikan konflik intern badan kepengurusan Plaza Kenari Mas.

Massa yang dilengkapi dengan berbagai macam spanduk ini berharap agar Walikota dapat memberi-

kan solusi. Sebab sejumlah pedagang ingin hidup tenang tanpa konflik yang berkepanjangan. Mereka mengaku resah dan merasa tidak nyaman akibat adanya kepentingan politik dalam badan pengurus. "Kami jadi nggak tenang kerja gara-gara ada kelompok-kelompok yang selalu berselisih ingin menjadi pengurus Plaza Kenari Mas, suasananya jadi nggak nyaman sama sekali, lingkungan jadi saling curiga," ungkap Arman selaku koordinator lapangan aksi saat ditemui wartawan.

Untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan puluhan keamanan dalam (kamdal) dan polisi disiagakan di depan pintu gerbang.

Sementara dihabangi terpisah, Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardele mengaku sebelumnya telah mengundang perwakilan developer, pemilik ruko dan pedagang. "Dan kita akan upayakan lagi untuk memiinggi ketiga pihak tersebut secara bersama, karena biar bagaimana pun Plaza Kenari merupakan aset penting," jelasnya singkat. (RKY)





# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Selasa**

Tanggal : **23**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Pekerja Minta Walikota Akhiri Konflik Pedagang Plaza Kenari

**GAMBIR (Pos Kota)** - Sekitar 200 pekerja di pusat perdagangan lampu hias, Plaza Kenari, Senen berunjuk rasa di kantor Walikota Jakarta Pusat, Senin (22/6). Mereka meminta Walikota Mangara Pardede segera turun tangan menyelesaikan konflik antar kelompok pedagang di Plaza Kenari.

"Pak Walikota kami minta selesaikan konflik antar pedagang, karena dampak dari konflik ini kami tidak tenang bekerja. Dampak konflik itu, masing-masing

pekerja saling curiga satu dengan lainnya," teriak Arman, pekerja, saat berorasi.

Tak hanya itu, adanya sekelompok oknum LSM yang memperkeruh suasana membuat kerja menjadi tidak nyaman. "Kami berharap, masalah ini segera selesai. Karena itu, Pak Walikota dengarkan ketiinginan kami dan segera turun tangan," ucapnya.

Aksi para pekerja yang tergabung dalam Komunitas Pekerja Kenari (KPK) tersebut berlangsung tertib

dan aman. Meski demikian, untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan pulih keamanan dalam (kamdal) dan polisi diagalkan di depan pintu perbang.

Walikota Mangara Pardede mengaku sebelumnya telah mengundang perwakilan developer, pemilik ruko dan pedagang. "Kita akan upayakan lagi untuk memanggil ketiga pihak tersebut secara bersamaan, karena biar bagaimana pun Plaza Kenari merupakan aset penting," jelasnya singkat. (deny/sk)



Pekerja di Plaza Kenari, Senen berunjuk rasa di depan kantor Walikota Jakarta Pusat.



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **SELASA**                      Tanggal : **23**                      Bulan : **JUNI**                      Tahun :                      2015

<b>MEDIA :</b>	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
<b>Halaman :</b>	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			<b>Kolom :</b> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

# Momentum Perbaikan Layanan

## Mendagri dan DPRD Soroti Serapan Anggaran yang Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS – Menyaan Hari Ulang Tahun Ke-488 Jakarta, Senin (22/6), menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki layanan publik. Pelayanan berupa nilai riil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan transportasi, dan peningkatan birokrasi menjadi agenda penting yang harus dilaksanakan.

Hal ini ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Sutopo Purwo Nugroho saat memimpin rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (DINKOMINFO) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/6) di Gedung Sate, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Sutopo menegaskan bahwa DINKOMINFO harus meningkatkan layanan publik yang lebih baik.

Sutopo mengatakan, DINKOMINFO harus meningkatkan layanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Menyambut momentum ini, DINKOMINFO harus meningkatkan layanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

### Catatan Dewan

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.



Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.



Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peningkatan layanan publik.



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : Selasa Tanggal : 23 Bulan : JUNI Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## TRANSJAKARTA

# 20 Bus Gandeng Scania Diluncurkan

JAKARTA (Suara Karya) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan 20 unit bus Transjakarta Gandeng merek Scania di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/6). Nantinya, bus buatan negeri Swedia itu akan dioperasikan di enam koridor.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Abah) mengatakan, pembelian bus Transjakarta kali ini melalui katalog elektronik jelekatalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP). Pembelian bus untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna angkutan massal andalan Ibu Kota ini.

"Saya sangat gembira karena memang kami ingin mendorong supaya pembelian atau pengadaan barang dan

jasa di Jakarta semuanya dilakukan melalui e-katalog LKPP. Dengan adanya bus-bus ini, kami berharap dapat memberikan layanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat," kata Basuki.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antarmas NS Kosasih mengatakan, bus bus tersebut saat ini belum dapat dioperasikan karena masih menunggu proses administrasi, seperti pelepasan dan STNK. Diperkirakan bus-bus itu baru bisa beroperasi pada pertengahan Juli 2015.

Bus gandeng itu memiliki kapasitas hingga 140 orang dengan 39 kursi yang terdiri dari enam kursi prioritas dan dua ruang untuk pengguna kursi roda. Di bagian dalam terdapat empat kamera pengawas (CCTV) dan di bagian luar ada dua CCTV, yakni di depan

dan belakang bus. Kemudian, bus tersebut juga memiliki dua lubang pengisian BKG, masing-masing terletak di bagian kanan dan kiri bus sehingga dapat diisi dari sisi manapun.

Kemarin PT Transportasi Jakarta memperkenalkan satu bus tingkat baru bermerek MAN buatan Jerman yang akan digunakan sebagai bus pariwisata gratis di wilayah Ibu Kota.

Percobaan bus tersebut dilakukan secara langsung oleh Gubernur DKI di kawasan wisata Monas, Jakarta Pusat, Senin.

"Bertepatan dengan Hari Uang Tahun (HUT) ke-488 DKI Jakarta, dengan penuh rasa syukur, secara resmi saya dan wakil gubernur meluncurkan bus wisata gratis," kata Abah sambil menekankan sirene tanda peresmian. (dwj)



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Sabtu** Tanggal : **23** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Serjana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## SATPOL PP DIPERSENJATAI

JAKARTA (Pos Kota) – Satpol PP Pemprov DKI Jakarta akan dipersenjatai. Langkah ini sebagai antisipasi adanya tindakan anarkis dari pelanggaran aturan daerah, terutama Perda Ketertiban Umum.

Redaksi: Darius, John, Yehya, Siliem

"Saya sudah merasa Satpol PP akan dipersenjatai alat kejut listrik. Biar pusing saja mereka," ujar Cuber Nur, Ahok di Balai Kota, Senin (22/6).

Mundur Ahok, alat kejut listrik akan digunakan untuk lapis pertama. Kemudian untuk lapis kedua akan dipersenjatai dengan gas air mata. Selanjutnya untuk lapis ketiga menggunakan peluru karet. Hal itu untuk mengantisipasi jika Kaki-5 kembali anarkis.

"Kalau anda anarkis saya tambah. Nanti peluru karet itu saya bilang itu lapis ketiga. Kalau tambah peluru listrik dia marah bawa golok dia tambah gas air mata. Kita sudah punya senjata itu. Kalau dia marah anarkis ya kita pakai peluru karet," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Saat ini Satpol PP sudah memiliki persenjataan tersebut. Namun tidak digunakan dalam berbagai pemertan. Namun melihat Kaki-5 yang semakin anarkis, maka peralatan justru akan ditambah. "Kita sudah punya. Saya minta Kepala Badan Penyelidikan Keuangan dan Daerah (BPKAD) untuk tambah," ucapnya.

Ahok menargetkan penyerangan oleh Kaki-5 di kawasan Lenggang Jakarta telah dimuncikan

sejak awal. Otonom aparat yang terlibat didalamnya akan diindikasikan dengan masing-masing.

Dengan sistem transaksi non cash, kios di Lenggang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Beberapa kios bahkan tidak ditempati pedagang. Karena mereka berencana menjual lagi.

Seperti diketahui ratusan Kaki-5 kembali menyerang sejumlah personel Satpol PP yang berjaga di Pasar Timur Monas. Mereka juga merusak fasilitas berjualan di kawasan kuliner Lenggang Jakarta, pada Sabtu (20/6) malam.

“  
Antisipasi Ada  
Tindakan Anarkis  
Pelanggaran Perda  
”

### RUGI Rp100 JUTA

Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Sei Indriawati mengatakan, kerugian akibat kerusakan sejumlah fasilitas mencapai Rp100 juta.

Beberapa barang yang rusak di antaranya empat LED TV, kaca kantor pengalut yang hancur seluruhnya, kaca toilet, meja kerja kantor, dua unit komputer kantor, satu printer, satu filing kabinet, 10 lampu pe-

narangan, crumler plastik dan logo Lenggang Jakarta.

### 10 PEDAGANG DIPERIKSA

Sementara itu, Polda Metro Jaya menuburu seek dibalik aksi anarkis pedagang Kaki-5 di Monas. Dari 10 pedagang yang diperiksa di Pasar Jakarta Pusat, satu ditopang sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes M. Himmud Iqbal mengatakan, pasca pengrusakan kepolisian terus melakukan penyelidikan. "Polda Metro Jaya terus mendalami kasus ini termasuk mengaitkan dengan peristiwa beberapa waktu lalu. Apa akar masalahnya, apa komplotasi atau bisa jadi ada orang sebagai koordinator di belakang Kaki-5" (st)





Hari : **Selasa**      Tanggal : **23**      Bulan : **JUNI**      Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Serfana	
	5. Koran Tempo	10. Polita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, **19**, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## Diduga Ada Sindikat Pemasok Dari Luar Jakarta Gawat... Pengemis Kian Marak Di Bulan Puasa

**Tak hanya banjirian setiap tahun, ibu kota juga banjirian ribuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di bulan Ramadhan. PMKS yang kebanyakan pengemis ini datang dari luar DKI seperti dari kota-kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah.**

**MEMBLUDAKNYA** PMKS ini jadi momok tahunan Pemprov DKI Jakarta. Keberadaan mereka jadi beban dan mengganggu kenyamanan umum Masyarakat. Kepala Dinas Sosial (Dinas) DKI menargetkan ribuan PMKS yang tersebar di berbagai sudut ibu kota ini diusok oleh sindikat.

Informasi yang dia peroleh, para sindikat pengemis ini mendong PMKS saat jalan to the road dan berkelah bersama yang digelar masyarakat ibu kota. "Sekarang ada titik-titik tertentu yang sudah kita imas. Misalnya, ada acara tertentu jika bersama di masjid besar, itu ada yang memvok PMKSnya. Kita sedang berkoordinasi," kata Masrokhah di Jakarta.

Dia berharap, kerja sama antara Satpol (DKI) kepolisian dan jajarannya bisa menumbangkan sindikat pemasok atau penyuluh pengemis, gelandangan, pengamen dan anak jalanan ini.

Sebelum, dinas menurut Masrokhah, tidak punya kewenangan menangkis sindikat sindikat ini karena masuk kejahatan human trafficking. "Saat ini kita belum berhasil menemukannya. Tidak bisa kita reagres sendiri. Gubernur kan sudah buat MoU dengan Kapolri. Nanti akan ada kerja sama khusus dengan kepolisian untuk menelusuri pemasok PMKS itu. Ada pasal-punya juga, masalahnya di kriminal

isasi," katanya.

Berdasarkan data itu, periode Januari hingga Juni 2015, terdapat 4.000 PMKS terdaftar saat beroperasi di Jakarta. Ribuan PMKS menengah dibina di pantai-pantai sosial dan segera dikembalikan ke kampung halaman masing-masing.

Sebagian dari mereka oleh Dinas DKI dikirim untuk bekerja ke perkebunan. Pihaknya bekerjasama dengan sebuah perusahaan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah.

Satu keberhasilan PMKS, pihaknya mengakui keberuntungan anggota intelijen untuk mengintai dan berharap peran masyarakat DKI. Berdasarkan data itu, ada 32 titik lokasi di Jakarta yang tersebar di Gros wilayah. Selama ini, pihaknya menggunakan operasi turun langsung ke lapangan bersama Satpol PP.

Seperti tahun lalu, PMKS yang terdaring wajib mengisi formulir perjanjian berisi pernyataan tidak akan kembali lagi ke Jakarta untuk mengemis. Jika tertangkap lagi, maka akan dikenakan pasal pidana.

Salah satu titik yang ramai dibanjiri PMKS adalah tempat pemakaman umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat. Malahan, para pengemis ini jumlahnya hampir sama dengan yang bertaruh. Kepala Seksi Layanan Pemakaman Umum (TPU) Suku Dinas Pertamanan dan Pemaka-

men Jakarta Pusat Didinggung menyoal masalah PMKS ini diproses. "Ada informasi, ada yang ngangos PMKS. Khususnya di Karet Bivak," ujarnya.

Mengantisipasi hal ini, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Satrio Budi Susantowati sudah menandatangani 10 anggota Satgas Pengawasan dan Pengendalian Sosial (PPS) di titik-titik lokasi PMKS, seperti pemukiman Harmoni, Bundaran Hotel Indonesia, TPU Karet Bivak dan Pasar Tanah Abang.

Sementara di wilayah Jakarta Barat, PMKS yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak mulai sekali ditemui di sudut-sudut kota, seperti flyover dan di tepi-pati keramaian lainnya seperti di Grogol, Kota Tua, kawasan Cengkareng, Jalan Latumenten dan Terminal Kalideres.

Seorang PMKS di flyover Grogol mengaku, sudah sepekan datang ke ibukota untuk mengemis rejeki selama bulan Ramadhan. Prinsipnya, Desa Sukamahi, Tasikmalaya ini, ternyata sudah melakoni kegotarannya memvok sedekah sejak 10 tahun lalu. "Selama 10 tahun ini, setiap Ramadhan kami ke Jakarta untuk meminta sedekah dari orang-orang yang lewat," ujar pria 40-an tahun yang juga memvok serta ibunya ini. ■■■■



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Selasa**      Tanggal : **23**      Bulan : **JUNI**      Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

**Aspirasi  
Warga Jakarta**

**Kirim SMS Bisa Berikut Foto  
Ke 0813 8505 1009**

atau telepon langsung redaksi (021) 638 51728  
foto kirim ke e-mail: poskotawarga@gmail.com

### Mohon Bersihkan Gubuk Liar

○ Yth. Bapak Gubernur DKI, bapak Camat Johar Baru, bapak Lurah Tanah Tinggi beserta jajarannya, kami mohon dengan hormat kepada bapak-bapak, tolong dibersihkan gubuk-gubuk liar disepanjang pinggir kali Sentiong, Jl. Kramat Palo Gendul Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru yang sangat kumuh dan membuat jalan jadi sempit ditambah dengan parkir-parkir motor liar dan dengan adanya pabrik tahu di tepi jalan, sangat mengganggu arus lalu lintas terutama di sore hari, atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih. (08561207xxx)

### Tertibkan Pedagang Bikin Macet

○ Kpd. Yth Walikota Jakarta Pusat. Saya salah seorang warga di kelurahan Kebon Melati yang berdampingan dengan pasar yang ada di Kel. Kebon Melati. Dalam hal ini saya sangat terganggu dengan banyaknya pedagang yang bisa dikatakan menggunakan sarana